

**TESIS**

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP UNIDROIT DALAM  
KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DI INDONESIA**



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

**RIZKA DESRIYALNI**

**2120113015**

**Pembimbing I : Dr. Ferdi, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

## ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP UNIDROIT DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

(Rizka Desriyalni. NIM. 2120113015, Program (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Andalas)

### ABSTRAK

Perbedaan sistem hukum antara negara-negara menimbulkan bermacam-macam aturan dasar mengenai suatu kontrak perdagangan internasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelaraskannya adalah dengan diadakannya konvensi internasional oleh *The International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) yang melahirkan *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract* (UPICCs). UPICCs sejatinya dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kontrak perdagangan internasional. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional?, Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam kontrak perdagangan Internasional pada kasus **Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL)**? serta apakah tantangan pelaksanaan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum internasional pengaturan tentang prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) diatur UPICCs. Sedangkan pengaturan dalam hukum nasional dapat dilihat di dalam KUHPerdara dan UU ITE. Selanjutnya pelaksanaan kedua prinsip tersebut telah diterapkan dalam kontrak perdagangan internasional antara **Nine Am Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL)**. Namun disaat kontrak berjalan, PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) menciderai prinsip itikad baik dengan melakukan wanprestasi, dengan dalih kontrak yang dibuat batal demi hukum karena tidak dibuat dengan Bahasa Indonesia, yang berakibat perkara ini diselesaikan secara litigasi. Oleh karena UPICCs banyak mengatur hal-hal yang tidak dirincikan dalam Buku III KUHPerdara, sehingga tantangannya adalah unifikasi dan kodifikasi hukum kontrak untuk memberikan kepastian hukum, dengan ketentuan yang seragam maka dapat diterima secara universal oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Pelaksanaan, Prinsip UNIDROIT, Kontrak  
Perdagangan Internasional di Indonesia.